



**JURNAL**

**ANALISIS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA WISATA WONOLOPO  
DI KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan  
Pendidikan Strata I  
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

**Penyusun**

**Rezza Abdy Pradana**

**14010112130098**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2016**

# **ANALISIS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA WISATA WONOLOPO DI KOTA SEMARANG**

**REZZA ABDY PRADANA  
(ILMU PEMERINTAHAN FISIP )  
ABSTRAKSI**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Desa Wisata Wonolopo di Kota Semarang yang tidak dapat berkembang seperti desa wisata yang lain di Kota Semarang. Sehingga program desa wisata di Kelurahan Wonolopo terancam tidak bisa dilanjutkan. Program Pembangunan Desa Wisata Wonolopo harus bisa dipertahankan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri secara merata sesuai dengan program Pemerintah Indonesia yang ingin mensejahterkan masyarakatnya secara merata dari tengah kota hingga masyarakat yang ada di desa. Untuk mempertahankan Desa Wisata Wonolopo, Pemda Kota Semarang harus bisa mengembangkan Desa Wisata Wonolopo. Pemda Kota Semarang harus menjalin kerjasama dengan Kelompok Sadar Wisata Wonolopo dan masyarakat Desa Wisata Wonolopo dalam mengelola program desa wisata di Kelurahan Wonolopo.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu melalui wawancara dengan informan dengan teknik *semistructure interview*. Sedangkan data sekunder berasal dari data dokumen atau sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif dengan menganalisa ke dalam bentuk uraian atau catatan, penggambaran dan penarikan kesimpulan atas gejala yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa tidak berkembangnya program desa wisata yang ada di Kelurahan Wonolopo terdapat permasalahan pada internal Kelompok Sadar Wisata Wonolopo itu sendiri. Permasalahan tersebut diawali dengan tidak tepatnya pengelolaan dana yang didapat melalui bantuan PNPM Pemerintah Pusat oleh salah satu kelompok orang dalam Kelompok Sadar Wisata tersebut. Selain itu, adanya pengawasan yang kurang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terhadap Kelompok Sadar Wisata Wonolopo. Infrastruktur jalan masih banyak yang rusak dan tidak terdapat arah penunjuk jalan. Sehingga pembenahan dari dasar sangat diperlukan agar Program Pembangunan Desa Wisata Wonolopo di Kota Semarang bisa berjalan lebih baik dari sebelumnya. Seperti pengelolaan yang lebih profesional di Kelompok Sadar Wisata Wonolopo, pembenahan infrastruktur jalan dan diberikan penunjuk jalan dan promosi berwisata ke Desa Wisata Wonolopo yang harus ditingkatkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Sehingga program desa wisata di Kelurahan Wonolopo bisa dipertahankan dan dikembangkan.

Kata kunci: Pembangunan Desa Wisata Wonolopo, Kelompok Sadar Wisata Wonolopo, Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang.

# **DEVELOPMENT PROGRAM ANALYSIS OF WONOLOPO TOURIST VILLAGE IN SEMARANG CITY**

**REZZA ABDY PRADANA**  
**(GOVERNMENT SCIENCE, FISIP UNDIP, SEMARANG)**

## **ABSTRACTION**

This research was motivated by the Tourism Village Wonolopo in Semarang who can not develop like other tourist village in the city of Semarang. So the tourist village in the Village program Wonolopo threatened not to proceed. Wonolopo Tourism Village Development Program should be maintained to create a prosperous society and independent evenly according to the Indonesian government program that people want mensejahterkan evenly from the Central State to the people in the village and prepare people to face the free market in ASEAN. To maintain Wonolopo Tourism Village, Semarang city government should be able to develop tourism village Wonolopo. Semarang city government should establish cooperation with Tourism Awareness Group Wonolopo and Tourism Village community in managing the program Wonolopo tourist village in Sub Wonolopo.

This type of research is descriptive analysis with qualitative approach. Sources of data derived from primary data through interviews with key informants or person with semistructure interview techniques. Secondary data derived from the data of documents, archives and other sources related to the research. Data collection techniques in this study using interviews, observation and documentation. While the analytical techniques used in this research by analyzing qualitative data analysis in the form of a description or notes, depictions and conclusion on the symptoms studied.

The results of this study found that the program is not developed tourist villages in the Village Wonolopo there are problems that are diinternal Wonolopo Travel Awareness Group itself. The problems started with the improper management of funds acquired through PNPM assistance of the Central Government by one group of people in the Travel Awareness Group. Additionally, adanya supervision less than Department of Culture and Tourism of Semarang on Wonolopo Travel Awareness Group. Moreover, the lack of attention from the local government of Semarang look at the lack of supporting facilities for running programs Wonolopo Tourism Village. Road infrastructure is still a lot of damage and there are no signposts direction. So that the revamping of the base is necessary for Rural Development Program in Semarang Tourism Wonolopo could run better than before

Keywords: Rural Development Wonolopo Travel, Tourism Awareness Group Wonolopo, Tourism Village Wonolopo Semarang

## **1. Pendahuluan**

Pariwisata di Indonesia memang beragam sehingga perlu pengelolaan yang baik agar tetap terjaga kelestariannya. Hal-hal yang mendukung berkembangnya pariwisata harus benar-benar diperhatikan dan dijaga. Karena bidang kepariwisataan ini memiliki peran dalam membangun perekonomian masyarakat di Indonesia. Khususnya masyarakat yang berada pada wilayah sekitar destinasi wisata. Pemerintah perlu membangun pariwisata yang berparadigma masyarakat. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menjadi paradigma yang baru bagi Indonesia. Paradigma seperti ini harus terus dijaga dan dikembangkan. Melalui paradigma inilah, bisa membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga bisa membangun ekonomi masyarakat yang belum memiliki peluang untuk bekerja. Khususnya masyarakat yang ada pada sekitar destinasi wisata tersebut. Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat ini salah satu contohnya adalah Kampung Wisata atau sering disebut Desa Wisata.

Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) dalam Hadiwidjoyo tahun 2012, Desa Wisata adalah suatu kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan. Baik dari segi kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik. Serta mempunyai potensi

untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan. Komponen kepariwisataan ini misalnya atraksi, akomodasi, makanan atau minuman, serta kebutuhan wisata lainnya<sup>1</sup>.

Desa wisata merupakan suatu pemberdayaan ekonomi rakyat pada bidang kepariwisataan. Melalui pengembangan desa wisata, perekonomian rakyat perdesaan atau masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan diangkat dengan kegiatan pariwisata berdasarkan unsur-unsur kegiatan yang sudah ada di daerah perdesaan serta ciri khas budaya setempat. Dengan kata lain, pengembangan kegiatan pariwisata tidak terlepas dari ciri kegiatan masyarakat yang telah ada, baik aspek ekonomi maupun sosial budaya. Desa wisata menjadi wadah bagi masyarakat yang terdapat pada desa tersebut untuk lebih menggali potensi-potensi yang dimiliki, agar dijadikan sebuah alternatif pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam bidang pariwisata.

Kota Semarang memiliki 3 desa wisata. Hal ini diperkuat dengan surat keputusan walikota Semarang nomor 556/407 yang ditanda tangani oleh Plt Walikota Semarang Hendrar Prihadi tanggal 21 Desember 2012. Desa wisata ini terletak di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Pati yang terletak di Kelurahan Nongkosawit dan Kelurahan Kandri dan Kecamatan Mijen yang terletak di Kelurahan Wonolopo. Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp. 75 juta untuk desa wisata maupun

---

<sup>1</sup> Hadiwijoyo, Suryasakti. (2012). Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat. Yogyakarta : Graha Ilmu.

kelurahan yang sedang dibina. Keputusan Pemerintah Kota Semarang yang bekerja sama dengan rakyat ini akan mampu mengintensifkan pembinaan sumber daya yang ada di Daerah yang dijadikan Desa Wisata. Diharapkan dengan adanya keputusan yang memutuskan desa wisata ini akan memperbaiki perekonomian rakyat pedesaan.

Desa Wisata Wonolopo merupakan desa wisata yang terletak pada Kelurahan Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang. Desa wisata Wonolopo sangat strategis karena dilalui jalur utama Jalan raya Semarang-Boja Kabupaten Kendal. Desa Wisata Wonolopo memiliki tanah yang subur, berudara sejuk, dan segar panorama alam yang masih terjaga ditambah dengan masih kuatnya budaya asli masyarakat Wonolopo dan memberikan kesan yang memiliki nilai edukasi dan kesederhanaan. Desa wisata memang memiliki daya tarik yang kuat untuk mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara. Akses menuju desa wisata yang mudah dijangkau. Hanya menggunakan bis arah Boja atau Cangkiran dan *Bus Trans Semarang* (BRT), sudah bisa mencapai Desa Wisata Wonolopo. Desa Wisata Wonolopo Mijen yang terkenal dengan perkebunan Durian dan perkebunan salak. Perkebunan durian merupakan nomor 2 yang mendominasi lahan yang berada di Kelurahan Wonolopo. Pertama lahan persawahan yang hampir 50 persen dari 100 persen total lahan yang ada di Kelurahan Wonolopo, Kota Semarang.

Desa Wisata Wonolopo ini terbentuk karena merupakan desa yang termasuk mandiri dalam hal pangan. 50 persen lahan di Desa Wonolopo

adalah persawahan yang subur. Masyarakat Desa Wonolopo banyak yang bercocok tanam. Karena didukung tanah yang subur dan pengairan yang lancar. Potensi alam yang terdapat pada Desa Wonolopo juga masih lestari dan terjaga. Masyarakat Desa Wonolopo yang ramah dan memegang budaya asli yang masih kuat menjadi pendukung dari keasrian Desa Wonolopo. Desa Wisata Wonolopo mencoba menangkap kerinduan sebagian masyarakat akan keindahan alam dan Budaya Jawa dengan melakukan karya nyata yang memang sejatinya karya dan karsa dari masyarakat Desa Wisata Wonolopo. Potensi-potensi Desa Wisata Wonolopo ini dari awal terbentuk tahun 2012 hingga sekarang terus dikembangkan.

Data dari Kelompok sadar wisata Wonolopo Bulan Januari 2016, Wisatawan yang hadir di Desa Wisata Wonolopo sebanyak 1500 pengunjung per Minggu. Tetapi ketika tidak musim hujan dan belum panen durian, wisatawan yang hadir terakhir sepanjang Bulan April hingga Oktober 2015 hanya menginjak 200-400 wisatawan per bulan yang hadir di Desa Wisata Wonolopo. Wisatawan yang hadir di Desa Wisata Wonolopo, selain dimanjakan dengan perkebunan durian, wisatawan akan diajak untuk melakukan kegiatan pembibitan tanaman. Mulai dari tanaman buah hingga menanam sayur non organik, sayur organik dan padi. Sehingga masyarakat tidak hanya jalan-jalan keliling di Desa Wisata Wonolopo, namun juga diajarkan untuk melestarikan alam.

Selain wisata alam, masyarakat Desa Wisata Wonolopo juga melestarikan budaya asli setempat dan menjadi wisata budaya. Budaya asli Jawa yang dilestarikan oleh masyarakat Desa Wisata adalah karawitan dan jatilan. Karawitan dan Jatilan ini pusatnya terdapat di RW 9 dan RW 7 Kelurahan Wonolopo Kota Semarang. Para wisatawan bisa mencoba karawitan yang dibudayakan oleh masyarakat Desa Wisata Wonolopo. Karawitan ini diberi nama Karawitran Sumo Laras. Selain memiliki karawitan dan jatilan, budaya yang dipertahankan dan dikembangkan adalah sendra tari. Namun sendra tari tradisional yang berada di Desa Wisata Wonolopo ini dipadukan dengan tari sepeda roda 1. Selain sendra tari, budaya yang dilestarikan di Desa Wisata Wonolopo ini adalah batik tulis. Kelompok ibu-ibu di Desa Wisata Wonolopo yang tergabung dalam kelompok PKK Kelurahan Wonolopo ini mulai belajar membatik dan mengembangkan usaha batik tulis, yang nantinya hasil batik tulis ini akan dijual melalui kampung batik ataupun bisa dijual kepada wisatawan. Wisatawan yang hadir di Desa Wisata Wonolopo ini bisa berlatih untuk membatik. Secara garis besar, potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Wisata Wonolopo cukup banyak. Apabila jika diukur dari karakteristik yang dijabarkan oleh Nuryanti, yaitu akomodasi dan atraksi, Kelurahan Wonolopo layak menjadi Desa Wisata.

Permasalahan Desa Wisata Wonolopo ini terletak pada tindakan nyata yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengembangkan Desa Wisata Wonolopo masih kurang intensif dan efisien. Desa Wonolopo ini

mulai dari tidak adanya papan penunjuk jalan. Plang penunjuk jalan yang memberikan wisatawan petunjuk untuk menuju Desa Wisata Wonolopo. Selain itu masyarakat Desa Wisata Wonolopo yang pendatang, kurang simpati terhadap Desa Wisata juga menjadi permasalahan yang dialami oleh Pengelola Desa Wisata Wonolopo. Sedangkan Pemerintah kurang mengembangkan daya tarik yang menjadikan Desa Wonolopo sebagai Desa Wisata yang wajib dikunjungi wisatawan. Bantuan berupa pelatihan tidak cukup untuk mengembangkan Desa Wisata Wonolopo. Penataan dan pembagian letak destinasi wisata juga masih belum jelas. Ini dibuktikan dengan *home stay* dari rumah penduduk kurang mendapatkan kunjungan dari wisatawan karena letaknya yang kurang strategis apabila dibandingkan dengan *home stay camp David* yang letaknya dekat dengan Jalan raya Semarang-Boja. Selain itu promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang juga masih sangat kurang. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memahami adanya Desa Wisata Wonolopo di Kota Semarang. Kurangnya penunjang dari Desa Wisata Wonolopo, akan menghambat pembangunan ekonomi kerakyatan yang secara merata. Hingga saat ini belum menunjukkan keberhasilan yang diharapkan oleh seluruh elemen masyarakat Desa Wisata Wonolopo.

## **2. Metode Penelitian**

### **2.1 Teori**

#### **2.1.1 Pembangunan Nasional**

Pembangunan Nasional merupakan sebuah langkah yang dilakukan Pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah dari tahun ke tahun selalu berusaha melakukan pembangunan secara merata. Pembangunan ini dari segala bidang, bidang sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya yang menunjang masyarakat untuk bisa merasakan kenyamanan dan kesejahteraan. Pembangunan ini memerlukan sumber daya yang cukup, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga sangat dibutuhkan ketelitian dari Pemerintah dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah untuk pembangunan Nasional, agar sesuai dengan maksud dan tujuan dari semua pihak, baik Pemerintah itu sendiri maupun masyarakat. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional, Secara umum hakikat pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Hakikat pembangunan ini mengandung makna bahwa pembangunan Nasional mengejar keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. Pembangunan Nasional yang bereksinambungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas, sehingga senantiasa mampu mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup lahir dan batin.

Pembangunan sering diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara Bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa.

### **2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan masyarakat secara positif dan memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. Pemerintah dari tahun ke tahun selalu berusaha melakukan pemberdaayaan sumber daya manusia. Pemberdayaan masyarakat dilakukan agar masyarakat tidak menggantungkan nasibnya kepada Pemerintah maupun orang lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat, masyarakat dituntut untuk mandiri dan mengembangkan diri untuk siap menghadapi persaingan pada era yang modern seperti saat ini. Sehingga pemberdayaan masyarakat akan membawa masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup. Menurut Permendagri Republik Indonesia nomor 7 tahun 2007 pasal 1 ayat 8 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.<sup>2</sup> Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, mendirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan.<sup>3</sup> Pemberdayaan harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, terutam masyarakat yang berada di wilayah terbelakang seperti desa. Masyarakat yang ada di desa lebih membutuhkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah maupun lainnya seperti sebuah organisasi. Kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat desa, akan menjadikan masyarakat desa memiliki pola berpikir yang berkembang.

## 2.2 Metode

Pada penelitian Analisis Program Pembangunan Desa Wisata Wonolopo di Kota Semarang, menggunakan studi analisis kebijakan. Studi analisis kebijakan ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pada suatu kebijakan dan mengetahui secara mendalam apa dan mengapa masalah bisa timbul. Studi analisis ini mempermudah penulis untuk mengolah data yang didapat dalam penelitian ini dan untuk mendapatkan data yang tepat. Difokuskan pada bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh obyek peneliti dalam menjalankan sebuah pembangunan. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk mengetahui terjadinya suatu aspek atau fenomena sosial tertentu dan

---

<sup>2</sup> Cholisin. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Laporan Penelitian. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Yogyakarta.

<sup>3</sup> *Ibid.* (2011). Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Yogyakarta.

mendeskripsikan fenomena sosial tersebut. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen, Kota Semarang dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang dengan terjun langsung ke lapangan yang menjadi masalah dalam implementasi program desa wisata, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi langsung (data primer) mengenai penelitian yang diambil.

### **2.3 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif (deskriptif). Jenis data ini secara abstrak mengacu pada esensi manusia, objek, dan situasi. Kata-kata yang digunakan paling tidak harus didasarkan pada hasil observasi, hasil wawancara, dan dokumen yang mencatat atau mengamati, menanyakan atau menguji, dan harus dipahami. Pengumpulan data ini bisa bersifat sangat terbuka, tak terstruktur, dan bersifat insidental, atau bisa jadi sebaliknya dan disesuaikan dengan maksud peneliti. Sumber data ada 2 yaitu menggunakan sumber data primer melalui wawancara semi terstruktur yang menuju langsung informan. Data sekunder melalui artikel yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti kerjakan, arsip, dan sumber penunjang lainnya.

### **3. Hasil Penelitian**

#### **3.1 Kebijakan Pemerintah dalam Membangun Desa Wisata Wonolopo dan Konsep dari Pembangunan Desa Wisata Wonolopo**

Surat Keputusan Walikota Nomor 556/407 tahun 2012 merupakan dasar hukum yang menjadi awal bagi masyarakat Desa untuk mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya melalui program desa wisata di Kota Semarang. Dalam surat keputusan dijelaskan juga bahwa adanya program desa wisata di Kota Semarang untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang, guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Kota Semarang. Selain itu, adanya program Desa wisata juga meningkatkan pendapatan dari Pemerintah Kota Semarang. Konsep pembangunan Desa Wisata Wonolopo, lebih kepada wisata edukasi dan agrowisata. Kelompok Sadar Wisata Wonolopo mulai menyusun menjadi desa wisata sejak tahun 2010. Kelurahan Wonolopo memang terfokus untuk menjadi agrowisata. Mengingat disana banyak sekali pohon durian yang digemari oleh wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang. Hal ini dibuktikan berdasarkan data Kelurahan Wonolopo tahun 2015, perkebunan rakyat totalnya adalah 1234 ha dan perkebunan sejenis seluas 32 ha serta sawah tadah hujan seluas 82.356 ha. Sehingga sangat sesuai menjadi agrowisata. Namun pada tahun 2013, Wisata yang disajikan oleh pengurus Kelompok Sadar Wisata Wonolopo berkembang dan tanpa mengubah potensi alam yang sudah ada sedikitpun. Wisata itu dimulai dari wisata alam, agrowisata, wisata kuliner, wisata UMKM Kelurahan Wonolopo, kampung jamu dan wisata edukasi yang nyaman bagi anak-anak dan keluarga untuk berkunjung ke Desa Wisata Wonolopo.

Penyajian destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Wonolopo tentu dilakukan atas persetujuan dengan seluruh masyarakat yang ada di Desa Wisata Wonolopo. Sehingga destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Wonolopo didukung oleh seluruh elemen yang ada dan terlibat di Desa Wisata Wonolopo, tidak terkecuali masyarakat Desa Wisata Wonolopo. Akan tetapi, dalam mengonsepan Desa Wisata Wonolopo terdapat permasalahan. Seperti infrastruktur jalan yang rusak, banyaknya perumahan modern yang menghilangkan keasrian Desa Wisata Wonolopo, fasilitas pendukung yang belum memadai, contoh angkutan untuk berkeliling Desa Wisata Wonolopo, dan tidak sinerginya anggota Kelompok Sadar Wisata Wonolopo karena adanya permasalahan internal yang ada di Kelompok Sadar Wisata Wonolopo.

### **3.2 Analisis**

Program Pembangunan Desa Wisata Wonolopo memiliki tujuan untuk menjadikan masyarakat Desa Wisata Wonolopo menjadi masyarakat yang mandiri dan memiliki pemikiran yang berkembang yang menjadikan masyarakat Desa Wisata Wonolopo memiliki kemandirian. Kegiatan dan langkah-langkah dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk program pembangunan Desa Wisata Wonolopo terus dilakukan untuk masyarakat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan kegiatan untuk menjalin hubungan baik dengan Kelompok Sadar Wisata di Desa Wisata di Kota Semarang. Kegiatan tersebut berupa pelestarian Kelompok Sadar Wisata. kegiatan yang paling banyak dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah pembinaan Kelompok Sadar Wisata. Pembinaan dilakukan paling banyak oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang karena pembinaan merupakan hal yang paling penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata, terutama Kelompok Sadar Wisata Wonolopo. Kemudian terdapat kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan destinasi wisata. Yang menyangkut Desa Wisata Wonolopo terdapat 3 kali kegiatan dalam satu tahun, yaitu pelatihan Sumber Daya Manusia di Desa Wisata. Kemudian kegiatan ketiga yang dilakukan dalam satu tahun adalah pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata. Berdasarkan hasil di lapangan, kegiatan sebanyak ini belum mampu dilaksanakan dengan maksimal. Salah satu sebab dari belum berjalannya dengan maksimal kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terbatas. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang harus membagi tugas untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Kota Semarang. Sehingga kegiatan ini tidak bisa berjalan maksimal di Desa Wisata di Kota Semarang, khususnya di Desa Wisata Wonolopo. Selain itu, Desa Wisata Wonolopo memiliki permasalahan internal yang dihadapi oleh pengurus Desa Wisata Wonolopo. Hal ini menjadi penghambat untuk berkembangnya Desa Wisata Wonolopo. Program Pembangunan Desa Wisata Wonolopo masih memiliki permasalahan-permasalahan yang diselesaikan. Sehingga memang pembangunan Desa Wisata Wonolopo masih memerlukan peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Wisata Wonolopo adalah sebagai berikut

- 1 Program Desa Wisata Wonolopo diresmikan melalui Surat Keputusan Plt. Walikota Semarang nomor 556/407 tanggal 22 Desember 2012. Tujuannya adalah meningkatkan kunjungan wisatawan ke obyek tujuan daerah wisata serta dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Surat Keputusan Walikota nomor 556/407 tahun 2012, menjelaskan Kelurahan yang dijadikan program desa wisata untuk didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan mengelola desa wisata, termasuk Desa Wisata Wonolopo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun, tidak dijabarkan secara jelas program kerja yang khusus dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mengelola desa wisata di Kota Semarang, termasuk Desa Wisata Wonolopo. Sehingga masih belum jelas program kerja apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam membangun Program desa wisata di Kelurahan Wonolopo.
- 2 Program yang kurang lebih telah berjalan selama 4 tahun ini masih memiliki banyak hambatan dalam program pembangunan Desa Wisata Wonolopo dalam mencapai tujuan yang optimal. Terdapat beberapa variabel yang menghambat program pembangunan desa wisata di Kelurahan Wonolopo. Adapun variabel tersebut diantaranya:

- 1 konflik internal, Konflik yang dihadapi oleh Kelompok Sadar Wisata Wonolopo mulai muncul ketika dana PNPM yang digunakan untuk pembangunan Desa Wisata Wonolopo turun. Ada beberapa pengurus yang mengelola keuangan dana bantuan pada Pemerintah tidak tepat. Sehingga pengurus Kelompok Sadar Wisata yang tidak terlibat dalam pengelolaan dana PNPM, merasa dirugikan.
- 2 Terdapat penempatan dana PNPM untuk Desa Wisata Wonolopo yang kurang tepat, pengelolaan dana yang kurang tepat bisa dicontohkan salah satunya adalah membeli alat musik untuk kesenian yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelaku seni di Kelurahan Wonolopo serta tidak ada biaya untuk memelihara *home stay* yang tersedia di Desa Wisata Wonolopo.
- 3 Koordinasi yang kurang baik, koordinasi antara Dinas-Dinas terkait dengan Kelompok Sadar Wisata Wonolopo dalam membangun Desa Wisata Wonolopo kurang baik bisa dilihat dari belum adanya arah penunjuk jalan menuju Desa Wisata Wonolopo yang seharusnya disediakan oleh Dinas Perhubungan. Pihak pengelola Desa Wisata Wonolopo telah mengajukan kepada Dinas Perhubungan untuk dibuatkan arah penunjuk jalan untuk menuju Desa Wisata Wonolopo sejak tahun 2014. Namun hingga saat ini belum tersedia. Sehingga ini berpengaruh dengan promosi Desa Wisata Wonolopo yang dilakukan oleh pengurus Desa Wisata Wonolopo.

- 4 Kurangnya perhatian Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terhadap pembangunan Desa Wisata Wonolopo, Hal ini terbukti dengan minimnya minat wisatawan untuk berkunjung ke Desa Wisata Wonolopo. Dalam waktu 4 tahun, wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Wonolopo tidak mencapai angka 2000 pengunjung. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang.
- 5 Kurangnya fasilitas pendukung, fasilitas pendukung yang masih minim seperti alat transportasi untuk berkeliling Desa Wisata Wonolopo, masih adanya infrastruktur jalan yang rusak, dan hilangnya keasrian Desa Wisata Wonolopo karena mulai munculnya perumahan modern.

## **5. Saran**

- 1 Diperlukan adanya evaluasi yang mendalam dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan Program Desa Wisata Wonolopo kedepannya, sehingga dapat mengantisipasi adanya permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Program Desa Wisata Wonolopo di Kota Semarang.
- 2 Dalam mencapai efektivitas dan efisiensi anggaran, dibutuhkan adanya perencanaan yang sistematis dan strategis terhadap apa saja yang menjadi kebutuhan atau hal yang *urgent* bagi pelaksanaan Program Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang.
- 3 Diperlukan peran yang lebih dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam mengelola Desa Wisata Wonolopo, terutama dalam

melakukan promosi Desa Wisata Wonolopo ke wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang.

- 4 Peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang ada di Desa Wisata Wonolopo harus dilakukan. Hal ini agar menaikkan kualitas dari Desa Wisata Wonolopo. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang harus segera melakukan pembenahan internal yang ada di Kelompok Sadar Wisata Wonolopo, dengan cara menyatukan visi dan misi masing-masing anggota dari Kelompok Sadar Wisata Wonolopo. Selain itu, regulasi pengelolaan Desa Wisata Wonolopo yang ada pada Kelompok Sadar Wisata Wonolopo harus dibenahi dan diperkuat agar tidak menimbulkan konflik yang sama.

#### **Daftar Pustaka**

- Hadiwijoyo, Suryasakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Iwan Nugroho dan Rochmin Daruri. 2004. *Pembangunan Wilayah perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan*. LP3ES : 189
- Lembaga Ketahanan Nasional. 1997. *Pembangunan Nasional*. Jakarta : PT. Balai Pustaka – Lemhannas. Halaman : 17.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan*. PT. Bumi Aksara. Jakarta. Halaman: 4.
- Rintuh, Cornelis, dan Miar. 2005. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. BPFE. Yogyakarta. Halaman : 84.
- Denzin, N.K. , Lincoln, S.Y. 2008. *Handbook of Qualitative Research*. Jogja. Pusaka Pelajar. Halaman 593.
- Laporan Pengunjung Desa Wisata Wonolopo. 2016. Semarang
- Restyani Ayu Putri, Diah Hariani, Susi Wulandari. (2013). Perencanaan Pembangunan Desa wisata Nongkosawit Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang ( dikutip dari Suara Merdeka 23 Juni 2012). Laporan Penelitian. Universitas Diponegoro.
- Surat Keputusan Walikota Semarang. (2012). Dalam <http://jdihukum.semarangkota.go.id/isi/SKWK/2012/> . Diunduh pada tanggal 12 November 2015 pukul 02:32 WIB.
- Perda nomor 14 tahun 2011. <http://jdihukum.semarangkota.go.id/2012/10/10/perda-2012/Perda> . Diunduh tanggal 2 November 2015 pukul 19:15.

